

Diseminasi Model Kolaboratif Dalam Pengelolaan Bencana di Provinsi Lampung : Studi Terhadap Penanganan Covid-19

Simon Sumanjoyo Hutagalung^a dan Eko Budi Sulistio^b

^{ab}Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila

e-mail : a. simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id , b. eb.sulistio@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan bentuk penelitian *Pre-Experimental Design* dengan rancangan penelitian *one group pre-test post-test design* . Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholder* pengelola bencana, sedangkan sampel yang terpilih sebagai kelompok eksperimen berjumlah 38 orang yang dipilih secara acak dengan teknik *cluster sampling* yang telah diuji homogenitas data pada keseluruhan populasi penelitian dengan menggunakan uji *Bartlett*. Hal ini guna mengakomodasi variasi keterwakilan peran *stakeholder*. Alat pengumpul data berupa soal tes pilihan ganda yang terdiri dari 20 butir soal *pre-test* dan *post-test* serta 20 butir pernyataan angket dan kisi-kisi soal yang keseluruhannya telah divalidasi oleh tiga orang validator dengan standar error 2%. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model terhadap sikap kelompok *stakeholder* dalam penanganan bencana. Disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata sikap kelompok *stakeholder* dalam penanganan bencana sebelum diterapkan model Kolaboratif tergolong kurang dengan rata-rata nilai sebesar 58,61 dengan standar deviasi 10, (2) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata sikap kelompok *stakeholder* setelah diterapkan model Kolaboratif tergolong baik dengan rata-rata nilai 79,61 dengan standar deviasi 9,85. (3) Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi diperoleh simpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan model Kolaboratif terhadap sikap kelompok *stakeholder*.

Kata Kunci: Model Kolaboratif; *Stakeholder* Bencana; Pemerintah Daerah

Dissemination of Collaborative Models in Disaster Management in Lampung Province: Studies on Covid-19 Management

Abstract

This study used an experimental research method with a pre-experimental research design with one group pre-test post-test design. The population in this study were disaster management stakeholders, while the sample selected as the experimental class was 38 people who were randomly selected by the cluster sampling technique who had tested the homogeneity of the data in the entire study population using the Bartlett test. This is to accommodate the variation in representation of stakeholder roles. The data collection tool was in the form of multiple choice test items consisting of 20 pre-test and post-test items as well as 20 questionnaire statements and a grid of questions, all of which had been validated by three validators with 2% error standard. Based on the data analysis, it can be concluded that there is an effect of the application of the model on the attitudes of stakeholder groups in disaster management. It can be concluded that: (1) Based on the results of the calculation, the average attitude of the stakeholder group in disaster management before the Collaborative model was applied was classified as less with an average value of 58.61 with a standard deviation of 10, (2) Based on the calculation results obtained an average attitude After applying the collaborative model, the stakeholder group was classified as good with an average value of 79.61 with a standard deviation of 9.85. (3) Based on the results of calculations using regression analysis, it is concluded that there is an effect of the application of the Collaborative model on the stakeholder group's attitude.

Keywords: Collaborative Model; Disaster Stakeholders; Local Government

A. PENDAHULUAN

Berbagai pengalaman bencana alam yang dihadapi manusia telah memberikan pembelajaran kepada berbagai pihak untuk merubah pola pikir dan cara tindak menanggulangnya. Dalam perkembangannya dewasa ini semakin disadari betapa pentingnya inter-relasi antara para pihak dalam setiap proses dan tahapan penanggulangan bencana. Baik pemerintah maupun masyarakat hendaklah sama-sama memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, menghadapi, menghindari, ataupun menanggulangi bencana alam yang dapat melanda tanpa diketahui waktu akan terjadinya. Jika pemerintah dan masyarakat di suatu daerah lebih siaga menghadapi dan mampu menanggulangi bencana, dampak kerugian yang akan dialami masyarakat dan daerah itu cenderung dapat ditekan atau diperkecil. Sebaliknya, apabila manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah buruk dan masyarakatnya tetap tidak berdaya maka kerugian akibat bencana alam bisa menjadi lebih besar atau bahkan akan berkepanjangan dan lebih rumit untuk diatasi.

Di tengah-tengah perubahan paradigma penanggulangan bencana ke arah yang lebih mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi sesuatu yang lazim dari proses pembangunan yang terdesentralisasi. Di Indonesia, perhatian pada pentingnya penanggulangan bencana sekurang-kurangnya telah pula diwujudkan lewat lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni di setiap provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Namun keragaan struktur organisasi semata tentulah tidak cukup. Itulah sebabnya dalam perkembangan cara pandang dan praktik penanggulangan bencana yang lebih mutakhir secara bersamaan tuntutan adanya tata kelola (*governance*) penanggulangan bencana yang lebih baik juga semakin nyata. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam inter-relasi para pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan amat menentukan seperti apa kualitas dan keberhasilan dari suatu aktivitas penanggulangan bencana. Pengalaman beberapa daerah dalam

melaksanakan rehabilitasi-rekonstruksi rumah warga terdampak pascagempa bahkan dinilai patut disebut sebagai salah satu praktik yang baik (*good practice*) dan kiranya bisa dijadikan rintisan untuk pembelajaran bagi berbagai pihak. Manajemen penanggulangan bencana yang dikembangkan pemerintah daerah secara transparan, partisipatif dan akuntabel justru bisa menjadi kunci mengoptimalkan pencapaian tujuan penanggulangan bencana.

Tata kelola (*governance*) memiliki arti dan peran sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan paling dasar dari suatu entitas politik, baik itu negara maupun wilayah-wilayah politik yang lebih kecil di bawahnya, termasuk seperti provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan memberi manfaat luas bagi tumbuh kembangnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat (Kemitraan, 2008).

Oleh UNDP tata kelola didefinisikan sebagai suatu proses, aturan, atau hasil interaksi antara kalangan legislatif, eksekutif, masyarakat sipil (*civil society*), pengadilan, dan masyarakat yang kemudian disebut para *stakeholder* di wilayah tertentu. Dalam hal ini tata kelola dimaknai sebagai pengejawantahan kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebuah negara di seluruh tingkatannya (UNDP, 1997). World Bank mengartikan tata kelola dari beberapa sisi. Di satu sisi tata kelola dapat diartikan sebagai aturan formal dan informal yang mengatur wilayah publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu tata kelola juga diartikan sebagai "kapasitas pemerintah untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta memberlakukan hukuman terhadap pelanggarnya" (WB, 1992). Kemitraan (2012) mendefinisikan tata kelola sebagai proses pembuatan kebijakan publik dan implementasinya melalui interaksi antara arena negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi (pasar). Sementara itu menurut Berggruen dan Gardels (2013) tata kelola (*governance*) adalah proses menyelaraskan budaya, institusi politik dan sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

dengan tujuan utama menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.

Berbagai definisi tata kelola (*governance*) yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap interrelasi antara para pihak dalam membuat keputusan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan hingga mengevaluasi setiap proses dan fase penanggulangan bencana. Secara khusus dari sudut pandang kajian ilmu sosial inter-relasi para pihak itu sendiri bisa dipelajari sebagai suatu perwujudan realitas sosial maupun fenomena tindakan sosial.

Berkenaan dengan konteks tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penanggulangan bencana di daerah sekurang-kurangnya harus ada tiga prinsip tata kelola paling pokok dalam inter-relasi para pihak dimaksud, yakni: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pertama, transparansi menyangkut keterbukaan akan informasi publik sebagai fondasi utama tata kelola yang baik dalam penanggulangan bencana. Kedua, partisipasi untuk memastikan adanya keterlibatan dari seluruh pihak terkait, utamanya masyarakat sebagai pemanfaat utama dari agenda dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Ketiga, akuntabilitas dalam pengertian seluruh pihak dapat dan wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan aksi atau tindakan yang diambil. Praktik tata kelola yang baik (*good governance*) minimal menerapkan ketiga prinsip itulah kemudian disebut juga oleh Kemitraan sebagai basis bagi sebuah tata kelola yang lebih kolaboratif.

Pada penelitian sebelumnya, diperoleh sebuah model yang berusaha merangkul keterlibatan para *stakeholder* dalam pengelolaan bencana. Model ini memiliki muatan yang menekankan kepada aspek potensial untuk kolaborasi dan kolaborasi dengan kelompok non-pemerintah dan swasta dalam menangani korban bencana jangka panjang, mengingat bahwa anggaran pemerintah hanya mencakup realokasi dan pembangunan rumah dan infrastruktur publik yang terdampak bencana, sementara kebutuhan pendukung lainnya belum siap. Fase rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan komitmen yang kuat. Seperti yang telah dinyatakan jika setelah bencana dimungkinkan there is konsentrasi LSM dalam fase bantuan dan penyelamatan. Namun, melanjutkan upaya dalam fase

rekonstruksi dan rehabilitasi membutuhkan komitmen jangka panjang. Pada fase ini, LSM dapat berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mengkomunikasikan kebutuhan dan prioritas masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, bagian yang paling menantang adalah aspek kesiapan untuk berperan, di mana kemampuan yang terlibat dalam rekonstruksi pasca bencana dapat ditularkan kepada generasi mendatang untuk mengantisipasi bencana berikutnya (Shaw, 2003). Dinamika dalam peran pemerintah menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak dapat menjadi pemerintahan sendiri, dalam konteks kebencanaan lebih banyak kolaborasi dan kolaborasi taktis antar pemangku kepentingan yang dibutuhkan, hanya saja posisi kelompok non-pemerintah dapat semakin diperkuat. Dalam kondisi ini, lebih banyak jaringan pemerintah umumnya lebih dibutuhkan sebagai organisasi terdesentralisasi dan tata kelola jaringan bersama yang dapat memfasilitasi kolaborasi dengan mengoptimalkan kepercayaan dan legitimasi dan meminimalkan ketidakseimbangan kekuasaan (Hermansson, 2016). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan pra bencana dapat memberikan manfaat dalam hal kepercayaan, kepemilikan dan pengurangan kerugian akibat bencana akibat proses dinamis yang memungkinkan kelompok masyarakat untuk berkontribusi, bertukar pikiran dan kegiatan pengambilan keputusan inklusif (Pandey, 2019). Model penanggulangan bencana di masa depan perlu multi *stakeholder* dan melibatkan peran yang lebih aktif dari kelompok non-pemerintah dan organisasi swasta yang memiliki kapasitas untuk mengelola bencana.

Pada bagian selanjutnya perlu dilakukan diseminasi dalam wujud pengujian konsep model terhadap kelompok yang menjadi pelaksana model. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang hendak diwujudkan dari penelitian ini, yaitu: (1). Apakah ada pengaruh model Kolaboratif dengan sikap para *stakeholder* pengelola bencana, (2). Apakah ada perubahan sebelum diperkenalkan model tersebut dengan setelah diperkenalkan model itu?. Kedua pertanyaan ini yang kemudian akan dibahas pada bagian selanjutnya.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian eksperimen dengan bentuk "pre-experimental design". Digunakannya bentuk pre-experimental karena peneliti tidak dapat mengontrol dan memanipulasi semua variable yang relevan antara lain tingkat kecerdasan kelompok sasaran dan latar belakang kelompok sasaran atau keadaan sosial ekonomi kelompok sasaran. Peneliti hanya dapat mengontrol dan memanipulasi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model Kolaboratif. Dalam penelitian ini hanya

digunakan satu kelompok sampel diberikan tes awal (*pre-test*) kemudian diberikan perlakuan tertentu, setelah itu dilakukan pengukuran terhadap kelompok sasaran tersebut dengan memberikan tes akhir (*post-test*). Pada penelitian ini digunakan rancangan *one group pretest-posttest design* yaitu rancangan yang digunakan satu kelompok subjek pertama-tama dilakukan pengukuran lalu dikenakan perlakuan untuk jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Persentase Jawaban Sikap Stakeholder Tentang Penerapan Model Kolaboratif

Penerapan Model	Frekuensi Observasi (f)	Jumlah Frekuensi (N)	Persentase	Kategori
1. Pelibatan Stakeholder	32	38	84,39 %	Baik
2. Mekanisme Interaksi	31	38	82,23 %	Baik
3. Proses Kendali	28	38	74,67 %	Cukup Baik
4. Sinergitas Tujuan Pengelolaan	29	38	75,49 %	Baik
5. Keberlanjutan	30	38	80,26 %	Baik

Sumber: Analisis Data, 2020

Berdasarkan pengolahan dan analisis hasil persentase di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa uji model itu kepada kelompok stakeholder dengan nilai pencapaian frekuensi observasi (f) sebesar 151 dan jumlah frekuensi

(N) sebesar 190 sehingga persentase yang dicapai adalah 79,21% dan masuk dalam rentang persentase 75% - 100% dengan kategori "Baik"

Table 2. Rangkuman Sikap Kelompok Sasaran (Pre-Test dan Post-Test)

Sikap Kelompok Sasaran	Rata-Rata Nilai	Standar Deviasi Nilai
Pre-Test	58,16	10,87
Post-Test	79,61	9,54

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sikap kelompok stakeholder sebelum diterapkan model Kolaboratif tergolong kurang dengan rata-rata nilai sebesar 58,16 dengan standar deviasi 10,87 dan sikap kelompok stakeholder setelah diterapkan dengan model Kolaboratif tergolong baik dengan rata-rata nilai 79,61 dengan standar deviasi 9,54. Hal ini menunjukkan bahwa sikap kelompok stakeholder yang diberikan materi tentang model Kolaboratif lebih baik dibandingkan

dengan sikap kelompok stakeholder yang belum mengenal model tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Rata-rata sikap kelompok sasaran sebelum diterapkan model Kolaboratif tergolong kurang dengan rata-rata nilai sebesar 58,61 dengan standar deviasi 10,87. Rata-rata sikap kelompok sasaran setelah diterapkan model Kolaboratif tergolong baik dengan rata-rata nilai 79,61 dengan standar deviasi 9,854. Berdasarkan hasil perhitungan

menggunakan analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi $Y = a + b X \leftrightarrow Y = 30.34 + 0.78, 63 X$ selanjutnya menghitung signifikansi dengan hasil $F_{hitung} = 9.20$ dan $F_{tabel} = 4.17$ maka H_0 ditolak pada taraf signifikansi 5%, artinya H_a diterima, yaitu terdapat pengaruh penerapan model Kolaboratif terhadap sikap kelompok sasaran dalam penanganan bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendanai riset ini melalui skema PTUPT tahun 2020, juga terima kasih kepada LPPM Universitas Lampung.

REFERENSI

Achmad Munib. 2004. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES Press
 Aunurrahman. 2008. *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta

Hadi, A dan Haryono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
 Hamalik, O. 2005. *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara
 Isjoni. 2007. *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
 Purwanto. 2010. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
 Soewarso. 2000. *Cara-Cara Penyampaian Pendidikan Sejarah Untuk Membangkitkan Minat Peserta Didik Mempelajari Sejarah Bangsa-bangsa*. Jakarta: Dirjen Dikti
 Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
 Suryono, H. 2005. *Statistik Pedoman, Teori dan Aplikasi*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
 Syah, M. 2010. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya